

# PENGADOPSIAN AKUNTANSI AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS PADA PROVINSI BANTEN

**Khoirul Aswar\***

**Ermawati\*\***

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[\\*aswar\\_law@yahoo.com](mailto:aswar_law@yahoo.com), [\\*\\*gemaupn@gmail.com](mailto:gemaupn@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the implementation of accrual accounting in Banten Provincial Government. This study sought to answer three research questions: First, the benefits derived from the implementation of accrual accounting system, the second, the challenge of implementing accrual accounting system and third, pre-condition for the successful implementation of accrual accounting. This study design descriptive study using a case study approach. The population in this study were 252 SKPD and staff PKK. Data were analyzed using SPSS software used to analyze the correlation between the results obtained from the respondents and the demographic characteristics of respondents. The findings show that the benefits derived from the implementation of accrual accounting enhanced asset management and improve the consistency and comparability of reported financial information. The major challenges are the lack of technology, information system, high cost, lack of resources. Furthermore, precondition that is, the availability of information technology, consultation and coordination, capacity building, and new formulation and amendment of accounting policy. There is a significant positive correlation exists between the benefits, challenges as well as the precondition of the implementing accrual accounting on the respondent demographic Characteristics of work experience, academic qualifications and professional responder.*

**Keywords:** *Accrual accounting, Benefit of AA, Challenges of implementing AA, Pre condition of AA*

## 1. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, permintaan masyarakat untuk perbaikan radikal dari kegiatan sektor publik mengakibatkan gelombang organisasi, reformasi manajerial dan akuntansi di sektor publik di seluruh dunia (Christiaens & Rommel, 2008). Reformasi akuntansi dianggap sebagai prasyarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan setiap reformasi organisasi atau manajerial lainnya. Hal ini karena sistem akuntansi direformasi mampu memberikan informasi keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung setiap reformasi lainnya (Christensen, 2007).

Reformasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan akuntansi dan pelaporan keuangan serta meningkatkan sektor akuntabilitas publik (Prodjoharjono, 2009). Konvergensi dengan akuntansi akrual dalam sektor publik didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat efisiensi untuk kebutuhan reformasi. Anggestam, (2010) menjelaskan bahwa entitas Sektor Publik harus merangkul akuntabilitas serta profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik.

Dorongan untuk akuntansi berbasis akrual di sektor publik telah berlangsung untuk waktu yang lama dan banyak entitas sektor publik telah memilih untuk mengadopsi reformasi akuntansi keuangan yang mendukung akuntansi akrual untuk menggantikan proses akuntansi kas. Hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan transparansi dan

pada gilirannya meningkatkan pengukuran kinerja sektor publik (Stamatiadis 2009; Nasi & Steccolini, 2008).

Menurut Carlin (2005), manfaat yang diperoleh dari akuntansi akrual meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas baik eksternal dan internal, kinerja organisasi yang lebih besar, alokasi sumber daya yang lebih baik dan efisiensi yang lebih besar berasal dari kemampuan entitas publik untuk mengidentifikasi biaya penuh kegiatan mereka. Bukti tentang manfaat akuntansi akrual sangat sedikit yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual sementara akademisi telah meremehkan pentingnya akuntansi akrual di sektor publik (Lapsley et al., 2009). Namun, banyak penelitian telah menganjurkan untuk keunggulan akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi kas maka alasan mengapa banyak organisasi sektor publik internasional telah mengadopsi atau sedang dalam proses penerapan prinsip akuntansi akrual (Connolly & Hyndman, 2006).

Meskipun banyak manfaat telah diakreditasi untuk inisiatif akuntansi akrual, sejumlah kelemahan dan masalah juga telah dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Adopsi akuntansi berbasis akrual membutuhkan investasi yang signifikan dari sumber daya baik dari segi keuangan dan dalam hal waktu. Ini mungkin berarti bahwa area lain dari alokasi sumber daya organisasi tidak cukup pengalamannya. akuntansi akrual menyediakan manajemen dengan kesempatan untuk menggunakan penilaian pada pengambilan keputusan pada banyak kasus dan karenanya perlu untuk memastikan ada cek di tempat untuk mengurangi insiden kesalahan (Hepworth, 2003). Menurut Christiaens dan Rommel (2008), tantangan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dapat terjadi karena salah tafsir dari standar akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengurangan nilai aset berwujud maupun tidak berwujud serta perlakuan akuntansi pendapatan dan pengeluaran. kegiatan organisasi sektor publik yang ditandai dengan prosedur yang panjang dan berulang-ulang yang mengakibatkan banyak hambatan pelaksanaan sehingga meningkatkan biaya dan waktu terhadap kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan perubahan akuntansi (Christensen, 2002).

Menurut Carlin dan Guthrie (2003), beberapa tantangan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual meliputi kurangnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan kelangkaan akuntan dengan pengalaman untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Manajemen puncak kadang-kadang gagal untuk mengambil peran utama dari proses implementasi sehingga memberikan staf dengan kesempatan untuk menolak perubahan tersebut. Kegagalan untuk memotivasi staf melalui kedua kompensasi keuangan dan non-keuangan untuk waktu dan tenaga ekstra juga bisa menyiratkan kegagalan pelaksanaan sistem akuntansi. Dalam rangka untuk menuai keuntungan penuh akrual akuntansi penting untuk mempertimbangkan masalah yang terkait dengan transisi untuk menghindari keterlambatan atau kegagalan implementasi dan menghindari skenario di mana masalah pelaksanaan akuntansi akrual dapat dihindari dan memperoleh manfaat yang diharapkan (Christiaens & Romel 2008 ).

Sebuah organisasi yang mengambil keputusan untuk pindah dari sistem akuntansi kas ke akuntansi akrual perlu mempertimbangkan faktor-faktor pre-implementasi agar untuk mengurangi risiko pelaksanaan dan pasca implementasi. Kesadaran tantangan implementasi ini memberikan wawasan organisasi untuk beberapa pra-kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual. Khan dan Mayes (2009), mengidentifikasi dukungan manajerial, dukungan peraturan, kemampuan teknis dan sistem informasi keuangan yang memadai seperti beberapa menguntungkan pra-kondisi untuk keberhasilan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual.

Provinsi Banten membuat keputusan untuk menerapkan akuntansi akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 untuk pelaksanaan pelaporan akuntansi akrual paling lambat tahun 2015. Ini dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan dampak dari sistem akuntansi dalam penyediaan layanan publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Opini tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, di mana Pemerintah Provinsi Banten memperoleh opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atas LKPD tahun 2014 ([www.sp.beritasatu.com](http://www.sp.beritasatu.com)).

Meskipun banyak keuntungan yang telah diidentifikasi dari penggunaan akuntansi akrual ada beberapa studi yang telah dilakukan baik yang mendukung atau meniadakan keuntungan. Mayoritas penelitian menganjurkan untuk pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual cenderung menjawab pertanyaan tentang mengapa organisasi harus mengadopsi itu bukan pertanyaan tentang apa efek mungkin terjadi dalam pengadopsian akuntansi akrual (Carlin, 2005). Beberapa peneliti berpendapat bahwa manfaat dari akuntansi berbasis akrual telah dibesar-besarkan dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa manfaat yang diklaim akuntansi akrual praktis telah dicapai (Anessi-Pessina & Steccolini, 2007).

Sebagian besar penelitian tentang akuntansi akrual di sektor publik telah dilakukan di negara-negara barat seperti Selandia Baru, Australia, Finlandia, Yunani, Denmark, Swedia dan Amerika Serikat. Hepworth melakukan penelitian tentang akuntansi akrual dalam pemerintahan Inggris (Hepworth, 2003). Sebuah studi tentang dampak dari akuntansi akrual di Selandia Baru dan Australia telah dilakukan pada tahun 2007 (Ellwood & Newbury, 2007). Stamatiadis juga melakukan penelitian tentang reformasi akuntansi keuangan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat di Yunani dengan tujuan memeriksa persepsi akuntansi dan petugas keuangan mengenai pelaksanaan akuntansi akrual di sektor kesehatan (Stamatiadis, 2009).

Ada bukti dari organisasi sektor publik sudah menggunakan sistem akuntansi akrual tidak selalu menghasilkan manfaat yang diharapkan. Pengadaptasian awal di sektor publik juga menghadapi banyak tantangan selama proses implementasi. Hal ini penting untuk Provinsi Banten dalam proses pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk belajar dari pengalaman organisasi pelopor sektor publik yang telah mengadopsi akuntansi akrual. Tinjauan literatur yang luas dari banyak studi akuntansi terhubung ke reformasi sektor publik mengungkapkan bahwa tidak ada studi mendalam telah dilakukan berfokus pada manfaat dan tantangan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual di salah satu Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Belum ada studi yang dilakukan pada Provinsi Banten untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. Motivasi dari penelitian ini adalah karena itu untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur akuntansi sektor publik. Sehingga, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Apa manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual?
- b. Apa tantangan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual?
- c. Apa yang penting dari pra - kondisi untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut teori kelembagaan baru, salah satu faktor yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai dan mempertahankan legitimasi di lingkungannya. Richardson (1987) menyatakan bahwa akuntansi merupakan sebagai lembaga legitimasi. Suchman (1995) mencoba untuk menentukan legitimasi dengan cara yang luas yang menggabungkan kedua dimensi evaluatif dan kognitif: "Legitimacy adalah persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan dari suatu entitas yang diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem yang dibangun secara norma sosial, nilai-nilai, keyakinan, dan definisi - definisi (hlm. 574). Organisasi mencari legitimasi untuk banyak alasan yaitu untuk meningkatkan kesinambungan atau kredibilitas dan/ atau untuk mencari dukungan persetujuan aktif atau hanya pasif (Suchman, 1995). Dari perspektif sektor publik, legitimasi mungkin dikejar dari pemerintah nasional lain, organisasi internasional, investor, kelompok kepentingan, dan warga negara sendiri (Baker & Morina, 2006).

Teori kelembagaan telah digunakan oleh berbagai penelitian reformasi akuntansi sektor publik di negara maju dan berkembang. Studi-studi ini meliputi pekerjaan (Lapsley & Pallot (2000) yang mengamati efek dari penerapan rezim akrual di Selandia Baru dan Inggris; dan Kanada (Baker & Rennie 2006). Selain itu, ter Bogt dan Van Helden (2000) juga menyelidiki pengaruh akuntansi sektor publik pada tindakan manajer dan politisi di pemerintah daerah di Belanda. Kontek di negara berkembang, Nor - Aziah dan Scapens (2007) juga menggunakan teori Kelembagaan dalam memeriksa Proses implementasi teknologi akuntansi sektor swasta diadopsi oleh pemerintah organisasi di Malaysia. Begitu juga dengan penelitian Steccolini et al. (2008) menggunakan teori kelembagaan dalam melihat faktor-faktor dalam pemerintah lokal untuk sistem yang terintegrasi yang berpengaruh dalam pengadopsian akuntansi akrual.

Penelitian sebelumnya pada literatur akuntansi sektor publik internasional diidentifikasi dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan akuntansi akrual. Konsisten dengan Deaconu (2009), manfaat utama dari akuntansi akrual meliputi, kinerja yang lebih baik, komparabilitas, meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan kontrol yang lebih efisien. Manfaat utama yang diperoleh dari pelaksanaan akuntansi akrual meliputi meningkatkan transparansi, meningkatkan konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan, peningkatan pengambilan keputusan, mengurangi pengeluaran dengan manajemen yang lebih baik serta meningkatkan aset dan kewajiban manajemen. Hasil akuntansi akrual untuk alokasi sumber daya ditingkatkan dan juga meningkatkan akuntabilitas.

Pengadopsian akuntansi akrual oleh organisasi sektor publik mempunyai beberapa kelemahan dan masalah yang dapat menghambat pencapaian manfaat akuntansi akrual (Christiaens & Rommel, 2008). Meskipun ada beberapa kritik mengenai adopsi akuntansi akrual dalam konteks organisasi sektor publik, organisasi sektor publik akan mengganti sistem akuntansi dimodifikasi kas dengan akuntansi berbasis akrual.

Menurut Barton (2009), Entitas harus dapat mempertimbangkan dan mengidentifikasi faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan akuntansi akrual agar manfaat maksimal dapat tercapai. Kesalahpahaman pelaksanaan sistem akuntansi baru dari berbagai pemangku kepentingan karena kurangnya pemahaman terhadap hambatan pra pelaksanaan. Masalah kurang paham ini yang akhirnya akan meningkatkan resiko sepanjang tahapan dan pasca-pelaksanaan (Aggestam, 2010).

Transisi ke akuntansi akrual perlu di organisir dan direncanakan dengan baik dengan menentukan prasyarat yang tepat, jika manfaat dan biaya tidak dipahami dengan baik maka tujuan untuk reformasi keuangan publik akan berisiko yang akhirnya kegagalan dalam penerapan akuntansi akrual akan diperoleh. Buruknya pengelolaan akuntansi akrual dalam proses transisi akan melampaui harga perangkat lunak, pelatihan dan perangkat keras. Transisi ke akuntansi akrual membutuhkan lebih dari sekedar penciptaan aplikasi, perubahan menyajikan dan menafsirkan angka ataru perubahan teknis dalam kebijakan akuntansi (Ouda, 2004).

Gracia, (2006) membentuk prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan menjadi tiga kelas yaitu pengguna, aturan, dan alat-alat teknologi. Cara di mana standar akuntansi yang diterapkan dapat menyebabkan sejumlah risiko yang dapat merusak validitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai responden adalah kepala SKPD dan Staf PPK SKPD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah dari masing-masing satuan kerja tersebut. Kriteria pemilihan kepala SKPD dan Staf PPK SKPD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah sebagai responden karena diharapkan mereka mengetahui dan memahami mengenai penerapan sistem akuntansi akrual yang baru didalam organisasi mereka, sehingga

jawaban kuesioner dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi yaitu seluruh satuan kerja pada wilayah kerja SKPD Provinsi Banten sebanyak 42 satuan kerja dengan staf PPK tiap satuan kerja sebanyak 5 orang. Sehingga total sampel penelitian ini berjumlah 252 responden.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang digunakan lima poin pertanyaan skala Likert dan memberikan ruang bagi responden untuk mengomentari masalah apapun yang mungkin belum tercermin pada kuesioner (Bryman, 2008). Metode ini sebelumnya telah digunakan dalam studi akuntansi banyak menyelidiki perubahan akuntansi dalam suatu organisasi (Dambrin, 2007; Sharma & Lawrence, 2008; Siti-Nabiha & Scapens, 2005).

### 3.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase frekuensi informasi yang diperoleh dari kuesioner umum. Mean sebagai ukuran tendensi sentral dihitung sementara standar deviasi mewakili ukuran dispersi data. Karena sifat kuantitatif dari penelitian saat ini, paket Microsoft Excel digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner.

Untuk mendapatkan statistik analisis korelasi, digunakan software SPSS. Tujuan utama dari melakukan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara karakteristik demografi responden dengan tanggapan mereka pada pertanyaan penelitian tiga. Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk menguraikan perbedaan dalam hubungan. Hal ini penting untuk dicatat bahwa kekuatan hubungan antara dua variabel jatuh antara -1 sampai +1. Dengan tingkat signifikansi 0,05, variabel dengan koefisien korelasi 0,1-0,29 dianggap rendah berkorelasi, antara 0,30-0,49 untuk cukup berkorelasi sementara koefisien korelasi di atas 0,5-1,0 dianggap korelasi tinggi (Pallant 2007).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi responden tentang manfaat pelaksanaan akuntansi akrual diperoleh melalui survei. Responden menyatakan pandangan mereka setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan berdasarkan skala Likert lima poin. Pandangan responden tentang manfaat yang diperoleh oleh organisasi karena adopsi dan implementasi akuntansi akrual di pemerintah Kota Banten.

### 4.1 Manfaat Pengadopsian Akuntansi Akrual

Hasil korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara peningkatan pengelolaan aset dan pengalaman kerja ( $r = 0,67, p < 0,000$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0,80, p < 0,000$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0,69, p < 0,000$ ). Peningkatan konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pengalaman kerja ( $r = 0,40, p < 0,010$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0,59, p < 0,000$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0,53, p < 0,000$ ). Korelasi positif yang signifikan juga diamati antara perbaikan manajemen kewajiban dan pengalaman kerja ( $r = 0,53, p < 0,000$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0,46, p < 0,000$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0,50, p < 0,000$ ) dari responden.

**Tabel 1. Hasil Person's Correlation untuk Manfaat**

Manfaat		Peng. Kerja	Kualifikasi Akademik	Kualifikasi Professional
Mnj. Aset	Person's correlation	0.67*	0.80*	0.69*
	Sig, (2 tailed)	0.000	0.000	0.000

	n	150	150	150
Kons & Komp	Person's correlation	0.40*	0.59*	0.77*
	Sig, (2 tailed)	0.010	0.000	0.000
	n	150	150	150
Kewjbn Mnj	Person's correlation	0.53*	0.46*	0.50*
	Sig, (2 tailed)	0.000	0.005	0.000
	n	150	150	150

Hasil survei menunjukkan bahwa responden berbeda pandangan dalam melihat manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan akuntansi akrual. Responden yang diamati dalam pengelolaan aset sebagai manfaat utama berasal dari pelaksanaan akrual akuntansi sehingga mengkonfirmasi temuan utama yang dilaporkan dalam literatur yang ada. Studi termasuk Connolly dan Hyndman (2006) yang menyimpulkan bahwa entitas publik dapat meningkatkan manajemen aset mereka setelah pengenalan akuntansi akrual, sementara Wynne (2008) menyimpulkan bahwa entitas publik secara efektif mengidentifikasi dan menjual aset yang tidak lagi diperlukan. Menurut Champoux (2006), entitas publik juga menerima informasi yang lebih baik untuk keperluan manajemen aset dan perhitungan biaya.

Peningkatan konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan yang dianggap sebagai manfaat utama dari akuntansi akrual. Hal ini konsisten dengan literatur yang ada. Menurut FEE (2008), penggunaan basis akrual untuk laporan keuangan publik meningkatkan komparabilitas organisasi sektor publik, sementara mempertahankan komparabilitas suatu organisasi secara periode per periode. Manajemen berkewajiban dalam meningkatkan juga mengidentifikasi sebagai manfaat utama dari akuntansi akrual. Menurut Kordestani dan Iranshahri (2010), akuntansi akrual mencerminkan organisasi kewajiban jangka panjang dan situasi keuangan keseluruhan yang lebih baik. Menurut Stamatiadis (2009), manfaat akuntansi akrual yang dapat meningkatkan pemantauan aset dan kewajiban dan ditingkatkan konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Para responden juga sangat merasakan bahwa akuntansi akrual disajikan posisi keuangan yang akurat dari organisasi, mengakibatkan peningkatan transparansi dan pengungkapan ditingkatkan dan pengukuran informasi keuangan. Menurut Thomas (2007), akuntansi akrual memiliki keuntungan bagi sektor publik seperti fasilitasi yang lebih baik dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan, evaluasi kinerja, menyajikan posisi keuangan dan evaluasi, dan penilaian kinerja keuangan. akuntansi akrual membantu meningkatkan manajer pengambilan keputusan, menyediakan biaya jasa yang lebih transparan dan kegiatan dan meningkatkan akuntabilitas manajer (Karbasi, Yazdi dan Tarighi (2010).

#### 4.2 Tantangan Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual

Hasil korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara sistem informasi keuangan yang tidak memadai untuk menangani persyaratan sistem akuntansi akrual dan pengalaman kerja ( $r = 0,73$ ,  $p < 0,000$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0,66$ ,  $p < 0,000$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0,72$ ,  $p < 0,000$ ). Ada hubungan positif yang signifikan antara biaya tinggi menerapkan sistem dengan pengalaman kerja ( $r = 0,64$ ,  $p < 0,010$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0,52$ ,  $p < 0,000$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0,43$ ,  $p < 0,008$ ). Hubungan positif yang signifikan juga terjadi antara peningkatan kebutuhan waktu dan sumber daya uang dan pengalaman kerja ( $r = 0,57$ ,  $p < 0,000$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0,60$ ,  $p < 0,005$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0,71$ ,  $p < 0,000$ ).

**Table. 2 Hasil Person's Correlation untuk Tantangan**

Tantangan		Peng. Kerja	Kualifikasi Akademik	Kualifikasi Professional
Sis Inf Keuangan	Person's correlation	0.73*	0.66*	0.72*
	Sig, (2 tailed)	0.000	0.000	0.000
	N	150	150	150
Biaya	Person's correlation	0.64*	0.52*	0.43*
	Sig, (2 tailed)	0.010	0.000	0.008
	N	150	150	15
Sumber daya waktu & Uang	Person's correlation	0.57*	0.60*	0.71*
	Sig, (2 tailed)	0.000	0.005	0.000
	N	150	150	150

Hasil survei mengkonfirmasi temuan utama dalam literatur yang ada di mana persepsi responden mengungkapkan bahwa tantangan utama pelaksanaan akuntansi akrual adalah sistem informasi keuangan yang tidak memadai untuk menangani kebutuhan sistem akuntansi akrual dan tingginya biaya pelaksanaan sistem (Lawson, 2005). Kurangnya sumber daya yang memadai dan peningkatan waktu dan sumber daya uang kebutuhan juga sangat tinggi. Persepsi responden konsisten dengan literatur yang ada di mana Wyk (2007), berpendapat bahwa beberapa hambatan utama dalam melaksanakan akuntansi akrual di sektor publik adalah perlunya sistem informasi baru, perlu untuk merekam aset dalam sistem dan kebutuhan untuk mengubah pola pikir dari para pejabat. Kesulitan dalam membangun angka neraca pembukaan juga sangat penting sebagai tantangan utama untuk pelaksanaan akuntansi akrual. Konsisten dengan persepsi responden, Hepworth (2003), berdasarkan pengalamannya di Eropa Timur, menyimpulkan bahwa adopsi akuntansi berbasis akrual membutuhkan investasi yang signifikan dari sumber daya baik dari segi keuangan dan dalam hal waktu. Ini berarti bahwa area lain dari alokasi sumber daya tidak cukup pengalaman organisasi. Mendirikan pembukaan angka neraca adalah memakan waktu dan memerlukan penggunaan penilaian dalam membangun saldo awal aset dan kewajiban (Khan dan Meyers, 2009).

Kurangnya motivasi staf dan insentif keuangan untuk melaksanakan perubahan baru juga sangat peringkat sebagai tantangan untuk implementasi. Ouda (2003) menyimpulkan bahwa perubahan sistem akuntansi melibatkan komitmen lebih banyak waktu oleh staf dari pada keadaan normal dan karena kendala keuangan, staf tidak diberikan insentif yang membuat mereka menanggung pekerjaan tambahan yang terlibat dalam pergeseran ke sistem akuntansi baru. Hasil responden menyatakan kurangnya komitmen manajemen puncak dan dukungan dan resistensi terhadap perubahan di bagian bawah tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan akuntansi akrual. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya dimana Harun (2007), menyimpulkan bahwa di sektor publik, pengambilan keputusan sangat terpusat dan sebagai reformasi sistem akuntansi diberlakukan oleh pemerintah itu akan diberikan prioritas tertinggi

oleh manajemen puncak dan karenanya tidak ada resistensi terhadap implementasi akuntansi akrual.

#### 4.3 Prasyarat untuk Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual

Hasil korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kemampuan teknologi informasi melalui upgrade atau mengganti informasi keuangan yang ada dengan pengalaman kerja ( $r = 0.47, p < 0.010$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0.50, p < 0.000$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0.65, p < 0.000$ ). hubungan positif yang signifikan juga terjadi antara konsultasi dan koordinasi di dalam menerapkan akuntansi akrual dan pengalaman kerja ( $r = 0.47, p < 0.010$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0.68, p < 0.010$ ) dan kualifikasi profesional ( $r = 0.69, p < 0.000$ ).

Demikian pula, hubungan positif yang signifikan ada antara pembangunan kapasitas melalui kesadaran, pelatihan dan sumber daya penyediaan dan pengalaman kerja ( $r = 0.77, p < 0.000$ ), kualifikasi akademik ( $r = 0.53, p < 0.000$ ) dan profesional kualifikasi ( $r = 0.79, p < 0.000$ ).

**Table. 3. Hasil Person's Correlation untuk Prasyarat**

Manfaat		Peng. Kerja	Kualifikasi Akademik	Kualifikasi Professional
Teknologi informasi	Person's correlation	0.47*	0.50*	0.65*
	Sig, (2 tailed)	0.010	0.000	0.000
	N	150	150	150
Konsul & Koordinasi	Person's correlation	0.47*	0.68*	0.59*
	Sig, (2 tailed)	0.010	0.010	0.000
	N	150	150	150
Pengemb. Kapasitas	Person's correlation	0.77*	0.53*	0.79*
	Sig, (2 tailed)	0.000	0.005	0.000
	N	150	150	150

Hasil survei persepsi responden pra-kondisi penting untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual responden merasa kemampuan teknologi informasi melalui peningkatan atau penggantian sistem informasi keuangan yang ada dan konsultasi dan koordinasi di dalam dan menerapkan akuntansi akrual di kota Banten sebagai prasyarat paling penting untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Menurut Hepworth (2003), pengenalan akuntansi akrual tidak terpikirkan tanpa ketersediaan perangkat lunak standar yang tepat dan terjangkau yang mampu menanggapi kebutuhan baru dan tambahan dari akuntansi berbasis akrual. Menurut Ouda (2004), konsultasi dan koordinasi antara dan di dalam entitas publik yang akan menerapkan sistem akuntansi akrual sangat penting untuk keberhasilan transisi akuntansi akrual terutama karena umpan balik informasi dengan saran perbaikan yang diperlukan.

Para responden juga dirasakan peningkatan kapasitas dan perumusan baru dan mengubah kebijakan akuntansi yang ada untuk keberhasilan transisi dengan akuntansi akrual. McKendrick, (2007) sepakat bahwa ada kebutuhan yang cukup untuk peningkatan kapasitas kelembagaan karena variasi dan kompleksitas tugas baru yang akan dilakukan selama pelaksanaan akuntansi akrual. Transisi ke sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan perubahan kebijakan akuntansi untuk mematuhi standar Akuntansi. Isu-isu yang tidak secara khusus ditangani oleh standar akuntansi mensyaratkan bahwa pengambil keputusan menggunakan penilaian dalam memilih kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk menjamin kredibilitas dan keandalan informasi keuangan (Khan dan Meyers, 2009).



Responden juga mengidentifikasi dukungan manajemen puncak dan komitmen, pelatihan personil dan insentif yang mempromosikan motivasi staf dan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan sebagai penting untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual. Christensen (2002) menyimpulkan bahwa promotor perubahan dapat mempercepat proses perubahan dan bahwa promotor dan produser perubahan akan lebih mungkin mencapai hasil yang sukses jika ada dukungan kuat. Ouda (2004) menekankan pada tenaga akuntansi termotivasi dan terlatih dan berkualitas untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual. Diamond (2002) menekankan perlunya komunikasi dengan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal pada proses implementasi untuk mendapatkan penerimaan dan mengurangi resistensi.

Keterlibatan auditor eksternal dan internal selama proses implementasi dan perubahan budaya manajemen untuk fokus pada output bukan input yang dianggap sebagai yang hal yang paling penting dari prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual. Fourie et al., (2002) mencatat bahwa perubahan sikap yang diperlukan untuk membuat sistem baru yang efektif sebagai proses kelembagaan menyajikan salah satu ancaman terbesar bagi keberhasilan pengenalan akuntansi akrual. Dukungan dari auditor eksternal sangat penting untuk setiap organisasi untuk mengubah sistem akuntansi keuangan untuk mengadopsi sistem berbasis akrual (Hepworth, 2003).

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini berfokus untuk menyelidiki pelaksanaan akuntansi akrual di Provinsi Banten. Penelitian difokuskan pada manfaat, tantangan yang dihadapi dan pra-kondisi penting untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual.

#### **1. Manfaat Mengadopsi Akuntansi Akrual**

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa peningkatan manajemen aset, meningkatkan konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan yang dilaporkan, perbaikan manajemen dan penyajian posisi keuangan yang akurat dari organisasi yang manfaat utama berasal dari penerapan akuntansi akrual.

#### **2. Tantangan Pelaksana Akuntansi Berbasis Akrual**

Menurut hasil survei, tantangan utama yang diidentifikasi sebagai kurangnya sumber daya teknologi khusus sistem informasi keuangan yang tidak memadai untuk mengatasi persyaratan pelaporan baru, tingginya biaya pelaksanaan sistem akrual dan kekurangan sumber daya yang memadai, kurangnya tenaga terlatih dan memenuhi syarat untuk menerapkan sistem ini dianggap sebagai salah satu tantangan penting dan kurangnya dukungan manajemen puncak dan komitmen dan ketahanan terhadap perubahan.

#### **3. Prasyarat untuk Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual**

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa yang paling penting pra-kondisi untuk keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual yaitu kemampuan informasi teknologi, konsultasi dan koordinasi dalam menerapkan akuntansi akrual, pembangunan kapasitas, perumusan baru dan amandemen kebijakan akuntansi yang ada dan dukungan manajemen puncak dan komitmen.

### **5.2 Saran**

Penelitian ini telah mengidentifikasi sejumlah manfaat yang timbul dari pelaksanaan akuntansi akrual termasuk aset yang lebih baik dan manajemen kewajiban, kinerja keuangan yang lebih baik, komparabilitas, proses pengambilan keputusan ditingkatkan, akuntabilitas ditingkatkan dan transparansi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa entitas publik lainnya harus berusaha untuk menerapkan akuntansi akrual untuk menyadari manfaat. Entitas harus

meng-upgrade atau mengganti sistem informasi keuangan, membangun kapasitas, mengalokasikan sumber daya yang memadai, efektif berkomunikasi dan memotivasi staf untuk siap dalam proses transisi. Kegagalan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pre-implementasi bisa mengalahkannya seluruh tujuan dari proses reformasi. Organisasi karena itu harus menciptakan lingkungan yang tepat sebelum menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penelitian lebih lanjut fokus pada pengembangan studi kasus untuk menyelidiki tingkat kepuasan akuntansi dan keuangan staf dengan penerapan akuntansi akrual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aggestam, C. (2010). A project management perspective on the adoption of accrual based IPSAS: Copenhagen Business School.
- Anessi- Pessina & Steccolini, I. (2007). Effects of budgetary and accruals accounting coexistence, evidence from Italian local governments: *Financial Accountability and Management*, 23(2), 0267-4424.
- Baker, R. O. N., & Rennie, M. D. (2006). Forces Leading To The Adoption of Accrual Accounting by the Canadian Federal Government: An Institutional Perspective. *Canadian Accounting Perspectives*, 5(1), 83–112.
- Barton, A. D. (2009). The Use and Abuse of Accounting in the Public Sector Financial Management Reform Program in Australia. *Abacus*, 45. 221-248
- Biraud, G. (2010). Preparedness Of United Nations System Organizations For The International Public Sector Accounting Standards.
- Bryman, A. (2008). *Social Research Method*, New York: Oxford University Press.
- Carlin, T. and Guthrie, J. (2003). ‘Accrual Output Based Budgeting Systems in Australia: The Rhetoric-reality Gap’, *Public Management Review*, 5, 2, pp. 145-62.
- Carlin, T.M. (2005). Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in the Public Sector: *Financial Accountability and Management*, Vol. 21 (3), pp. 309-336.
- Christensen, M. (2002). Accrual accounting in the public sector, the case of the New South Wales government: *Accounting History*, Vol. 7, pp. 93-124.
- Christensen, M. (2007). What we might know but aren't sure about public sector accrual accounting: *Australian Accounting Review*, Vol. 17, No. 1, pp.51–65.
- Christiaens, J. & Rommel J. (2008). Accrual Accounting Reforms, only in businesslike (parts of) governments, *Financial Accountability and Management Journal*.
- Connolly, C. & Hyndman, N. (2006). The Actual Implementation of Accruals Accounting - Caveats from a Case within the UK Public Sector: *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 19, No. 2, pp. 272-290.

- Dambrin, C., Lambert, C. & Sponem, S. (2007). Control and Change – Analysis of the Process and Institutionalization: Management Accounting Research, vol.18.
- Deaconu, A., Nistor, C.S. & Filip, C.I. (2009). The Effect of Transiting from Cash Accounting to Accrual Accounting on Performance in the Public Sector: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Oeconomica, vol. 54.
- Diamond, J. (2002). Performance budgeting – Is accrual accounting required, Washington D.C.: International Monetary Fund, Working Paper, no. 02/240.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. American Sociological Review, 48, 147–160.
- Ellwood, S & Newberry, S (2007). Public Sector Accrual Accounting, Instituting Neoliberal Principles?: Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 20 No 4.
- FEE (Federation des Experts Compatibles Europeans) (2007). Accrual Accounting in the Public Sector: FEE Public Sector Committee.
- FEE (2006, December). The New Public Management, a Perspective for Finance Practitioners.
- Fourie, D., Pauw, J.C., Linde, G.J.A., Visser, C.B. and Woods, G. (2009). Managing Public Money – Systems from the South, Johannesburg: Heinemann Publishers.
- Gracia, M. (2006, September). IPSAS implementation: an operational view: Presentation at CIPFA Annual Seminar.
- Harun (2007). Obstacles to public sector accounting reform in Indonesia: Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 43 No. 3, pp. 365-75.
- Hepworth, N. (2003). Preconditions for Successful Implementation of Accrual Accounting in Central Government: Public Money and Management, 23(1), 37-43.
- Hyndman, N. and Connolly, C. (2005). The impact of introducing resource accounting in Northern Ireland, London: ACCA.
- IFAC, (2003). Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities, New York: International Federation of Accountants.
- IFAC. (2011). IFAC handbook of international public sector accounting pronouncements, New York: IFAC.
- KarbasiYazdi, H. & A. Tarighi (2010). Assessing the benefits of accrual accounting systems in Medical Sciences and Health Services University of Tehran: Journal of Auditing Knowledge, No. 30, Autumn, pp. 16-27.
- Khan, A. & Meyers, S. (2009). Transition to accrual accounting, fiscal affairs: Department International Monetary Fund technical notes.

- Kordestani, G.H. & Iranshahy, A. (2010). Survey Factors Affecting of Accrual Accounting Adoption in the Public Sector: *Journal of Auditing Knowledge*, No. 28, Spring, pp. 10-21.
- Lapsley, I., Mussari, R. & Paulsson, G. (2009). On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector - A Self-evident and Problematic Reform: *European Accounting Review*, vol. 18, no. 4, pp. 719-723.
- Lapsley, I., & Pallot, J. (2000). Accounting, management and organizational change: A comparative study of local government. *Management Accounting Research*, 11(2), 213–229.
- Lawson, R.A. (2005). The use of activity based costing in the healthcare industry: 1994 vs 2004: *Research in Healthcare Financial Management*, Vol. 10 No.1.
- McKendrick J. ( 2007). Modernization of the public accounting systems in central and eastern European countries, the case of Romania: *International Public Management Review*.
- Nasi, G. & Steccolini, I. (2008). Implementation of accounting reforms: *Public Management Review*, 10(2): 175-196.
- Nor-Aziah, A. K., & Scapens, R. W. (2007). Corporatisation And Accounting Change. The Role Of Accounting And Accountants In A Malaysian Public Utility. *Management Accounting Research*, 18(2), 209–247.
- Ouda, H. (2003), Implementation Barriers of Accrual Accounting in the Public Sector of Developed and Developing Countries: An Empirical Investigation. Paper Presented at 9th CIGAR Conference, Bodo University, Bodo, Norway, 13-14 June 2003.
- Ouda, H. (2004). Basic Requirements Model for Successful Implementation of Accrual Accounting In the Public Sector, *Public Fund Digest*, 4(1). 74-99 The International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM), Washington, D.C
- Pallant, J. (2007). *SPSS Survival Analysis*, Crows Nest: Allen & Unwin.
- Prodjoharjono, S. (2009). Accrual accounting in the public sector: *The Audit Forum*, Vol XI, 3:22-40.
- Public Sector Committee, (2002). Transition to the accrual basis of accounting, guidance for governments and government entities: New York: International Federation of Accountants, December, Study 14.
- Price waterhouse Coopers. (2011). Implementing International Accounting Standards in the Public Sector (IPSAS) as part of wider finance reform, PwC Global Public Finance and Accounting Network, Case Study, IPSAS at the European Commission.
- Richardson, A. J. (1987). Department of Accounting Faculty of Business , University of Alberta. *Accounting, Organizations and Society*, 12(4), 341–355.
- Sharma, U. & Lawrence, S. (2008). Stability and change at FPTL, An institutional perspective: *Australian Accounting Review*, vol. 18, no.1, pp25-34.

- Siti-Nabiha, A. K. & Scapens, R. W. (2007). Stability and change - an institutionalist study of management accounting change: *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, vol. 18, no.1, pp44-71.
- Stamatiadis, F. (2009). Investigating the governmental accounting reform of Greek national health system (ESY) - some preliminary evidence.: *International Journal on Governmental Financial Management*, 9(2).
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Steccolini, I., Anessi-Pessina, E., & Nasi, G. (2008). Accounting Reforms: Determinants of Local Governments Choices. *Financial Accountability & Management*, 24(3), 321–342.
- Ter Bogt, H. J., & Jan van Helden, G. (2000). Accounting Change In Dutch Government: Exploring The Gap Between Expectations And Realizations. *Management Accounting Research*, 11(2), 263–279.
- Wyk, H.A. (2007). Is the transformation of public sector financial reports in South Africa's provincial government on track: *Meditari Accounting Research*, 15(2), 65-75.
- Wynne, A., (2008). Accrual Accounting for the Public Sector – A Fad that Has Had Its Day: *International Journal on Governmental Financial Management*, vol. 3, nr. 2 pp.117-132.